



RENJA 2024

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Renja BPBD Tahun 2024 akan dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan batasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Sulawesi Selatan guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin.

Makassar, September 2023

KEPALA PELAKSANA,

AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19701113 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RenjaTahunLalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ...	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	41
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	45
BAB V Penutup	61

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1.	Tabel T-C 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan.....	7
2. Tabel 2.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	18
3. Tabel 2.3.	Capaian Indikator Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	18
4. Tabel 2.4.	Capaian Indikator Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	19
5. Tabel 2.5.	Tabel T-C 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan	20
6. Tabel 2.6.	Tabel T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan	29
7. Tabel 2.7.	Tabel T-C 32. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan	40
8. Tabel 4.1.	Tabel T-C 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selanjutnya disebut Renja OPD, merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah.

Renja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan tujuan sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, dan lokasi kegiatan sesuai dengan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Selanjutnya Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prdoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
- o. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
- p. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- q. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Kajian Pembentukan Penyelenggaraan UPT;
- r. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana;
- s. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- t. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- v. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya;
- w. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya;

- x. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- y. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- z. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ;
- aa. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22, tanggal 30 Juni 2022).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebencanaan yang lebih baik untuk periode RKPD Tahun 2024, sesuai visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara khusus, penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah untuk mengetahui:

1. Evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;
2. Tujuan dan sasaran;
3. Indikator kinerja dan kelompok sasaran;
4. Pagu indikatif program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Mengevaluasi renja tahun sebelumnya;
2. Merencanakan program dan kegiatan;
3. Perumusan tujuan dan sasaran;
4. Mengetahui pagu indikatif program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang berisikan gambaran rencana kerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
- 1.2 Landasan Hukum merupakan Landasan hukum penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- 1.3 Maksud dan Tujuan secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebencanaan yang lebih baik, sesuai visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1.4 Sistematika Penulisan merupakan urutan yang terstruktur dalam sebuah laporan yang menunjukkan isi dari laporan itu secara teratur.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan Pendekatan yang sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan merupakan kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya, BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra bencana, saat tanggap darurat bencana hingga tahapan pasca bencana.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPBD dan tingkat kinerja yang dicapai, serta pagu indikatif yang tersedia.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berisikan usulan-usulan kabupaten/Kota dalam proses forum perangkat daerah.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional berisikan Arah kebijakan Nasional bidang penanggulangan bencana (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024), penanggulangan bencana yaitu “Mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan”.

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang ingin dicapai setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- 3.3 Program dan Kegiatan berisikan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Disusun berdasarkan hasil Musrenbang dengan mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan di lapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas provinsi.

Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai 24 (dua puluh empat) Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 46.717 Km² merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks karena terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat 2 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan sedangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terdapat 2 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda dalam Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2023.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C 29.

Tabel T-C 29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase tanggap darurat bencana yg tertangani (Prioritas)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Persentase Aparat kesiapsiagaan bencana yg terlatih	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Cakupan ketersediaan sistem peringatan dini bencana	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah /lega	1	0	1	1	100,0	0	0	0,0
Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana	Jumlah aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lintas sektoral yang mendapatkan informasi dan edukasi daerah rawan bencana	600	200	160	160	100,0	200	200	600,0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Kebencanaan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang telah disusun dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	1	1	0	0	0,0	0	0	0,0
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	600	100	75	75	100,0	200	200	600,0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018- 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pendendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10	6	8	8	100,0	10	10	10,0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkatan Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	600	200	300	300	100,0	200	200	600,0
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	2	0	1	1	100,0	1	1	2,0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat Bencana	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aparatur yang merespon cepat penanganan darurat bencana	600	200	200	200	100,0	200	200	600,0
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Jumlah logistik penanggulangan bencana yang tersedia dan tersalurkan	27500	8700	9000	9000	100,0	9500	9500	27500
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan data bencana kabupaten/kota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0	100,0
Penanganan Pasca bencana Provinsi	Jumlah dokumen (JITU PASNA) dan (R3P) yang disusun	5	5	5	5	100,0	5	5	5,0
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah aparatur yang terlibat dalam Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	300	200	200	200	100,0	100	100	300,0
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	1	0	1	1	100,0	1	1	1,0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang di dibina terkait Penanggulangan Bencana	16	0	24	24	100,0	8	8	16,0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100,0	99,58	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	2	1	1	1	100,0	1	1	2,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD/SKPD yang tersedia	3	1	1	1	100,0	1	1	3,0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD/SKPD yang tersedia	3	1	1	1	100,0	1	1	3,0
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD/SKPD yang tersedia	3	1	1	1	100,0	1	1	3,0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA OPD/SKPD yang tersedia	3	1	1	1	100,0	1	1	3,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan dokumen pendukung LPPD yang tersedia	6	2	2	2	100,0	2	2	6,0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	45	40	38	38	100,0	45	45	45,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang telah disusun	45	15	15	15	100,0	15	15	45,0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	3	1	1	1	100,0	1	1	3,0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	252	0	0	0	0,0	95	95	95,0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi aparatur yang tersedia	10	6	6	6	100,0	6	6	10,0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10	6	0	0	0,0	0	0	0,0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang ikut sosialisasi peraturan perundang-undangan	4200	300	75	75	100,0	1500	1500	4200

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	467	152	60	60	100,0	160	160	467,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	40	38	2	0	0,0	40	40	40,0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	35	0	30	30	100,0	35	35	35,0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan, minum dan snack tamu yang tersedia	6000	2000	1980	1980	100,0	2000	2000	6000,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi yang diikuti	300	100	33	33	100,0	100	100	300,0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, surat kabar dan internet yang terbayarkan	324	108	84	84	100,0	108	108	324,0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Tenaga Non ASN/Magang	46	46	46	46	100,0	46	46	46,0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan telah terbayarkan	15	15	15	15	100,0	15	30	15,0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	5	5	3	3	100,0	5	8	5,0
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	2	2	2	2	100,0	2	4	2,0

Berdasarkan data realisasi instansi, pada tahun 2023 seluruh program/kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang diharapkan. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut:

1. Pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif
2. Pengawasan (monitoring) dari pimpinan OPD sehingga keseluruhan kegiatan terlaksana sesuai target waktu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 adalah:

1. Adanya Refocusing Anggaran menyebabkan target kinerja beberapa sub kegiatan terealisasi berdasarkan anggaran yang tersedia.
2. Minimnya peralatan penanggulangan bencana sehingga membuat pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban bencana menjadi kurang maksimal.
3. Sumber Daya Manusia dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) sangat terbatas menyebabkan terhambatnya penyaluran logistik ke berbagai Kabupaten/Kota yang terdampak bencana.

Berdasarkan kendala yang dihadapi, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian antara anggaran tersedia dengan target kinerja sub kegiatan dimaksud agar dapat terlaksana secara optimal.
2. Memaksimalkan pencapaian target kinerja dan membuat perencanaan anggaran terkait pengadaan peralatan penanggulangan bencana pada APBD 2024.
3. Mengirimkan surat permintaan kepada BKD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengusulkan penambahan aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan maka BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam hubungan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana, yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana

Evaluasi kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam menyusun perencanaan program/kegiatan periode selanjutnya. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2021. Pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022

No.	Indikator	2022			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% realisasi	
1	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan	152.55	150.07	101,65	150.05

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022, **menunjukkan capaian 101,65%**.Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

a. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Semenjak penerapan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, urusan Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan dalam Upaya Pengurangan resiko bencana merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan. Posisi pengurangan resiko bencana menjadi semakin kuat karena perubahan paradigma penanggulangan bencana dari paradigma kedaruratan bencana menjadi paradigma pengurangan resiko bencana.

Capaian Kinerja BPBD dalam usaha mencapai sasaran upaya menurunkan indeks risiko bencana berdasarkan renstra dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Menurunnya Indeks Risiko Bencana
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022

No.	Indikator	2022			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% realisasi	
1.	Indeks Risiko Bencana	152.55	150.07	101,65	150.05

Pada tahun 2022, realisasi capaian kinerja menunjukkan skor yang **tinggi**, yaitu sebesar 101,65% khususnya untuk indikator Indeks Risiko Bencana.

Usaha pengurangan resiko bencana juga didukung oleh upaya Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai upaya mitigasi bencana. Dukungan tersebut diharapkan mendorong meningkatnya kewaspadaan seluruh *stakeholder* terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan dapat dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator Hal ini mempengaruhi capaian kegiatan secara keseluruhan sehingga capaian indikator rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) memperoleh kriteria sangat tinggi. Analisis Capaian Kinerja BPBD dalam usaha mencapai sasaran upaya pengurangan resiko bencana dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Sasaran Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022

No.	Indikator	2022			Target Akhir RPJMD (2023)
		Target	Realisasi	% realisasi	
1.	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100	100%
2.	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	91	100	109,89	92
3.	Nilai SAKIP OPD	82	80,01	97,57	85

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dalam table T-C 30.

Tabel T-C 30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
(1)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	
(2)	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana			200 Orang	200 Orang	100 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang	100 Orang	100 Orang	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
(3)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			0	0	0	0	0	0	0	0	
(4)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			200 Orang	200 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100 Orang	200 Orang	
(5)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			8 Jenis	10 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Jenis	10 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(6)	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana			200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
(7)	Penyusunan Rencana Kontijensi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
(8)	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			200 Orang	200 Orang	12 Laporan	12 Laporan	200 Orang	200 Orang	12 Laporan	12 Laporan	
(9)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			9.000 Paket 200 Orang	9.500 Paket 200 Orang	50.000 orang	55.000 orang	9.000 Paket 200 Orang	9.500 Paket 200 Orang	50.000 orang	55.000 orang	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100%	100%	5 laporan/Dokumen	5 laporan/Dokumen	100%	100%	5 laporan/Dokumen	5 laporan/Dokumen	
(10)	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			5 Dokumen 400 Orang 9 Kab/Kota	5 Dokumen 400 Orang 9 Kab/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	5 Dokumen 400 Orang 9 Kab/Kota	5 Dokumen 400 Orang 9 Kab/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
(11)	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	
(12)	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			100 Orang	100 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Orang	100 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	
(13)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	

(14)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi			8 Kab./Kota	8 Kab./Kota	1 Laporan	1 Laporan	8 Kab./Kota	8 Kab./Kota	1 Laporan	1 Laporan	
No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	100%	16 Dokumen	16 Dokumen	
(15)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
(16)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
(17)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
(18)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
(19)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
(20)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	
(21)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			42 Orang	45 Orang	40 Orang	43 Orang	42 Orang	45 Orang	40 Orang	43 Orang	
(22)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			15 Dokumen	15 Dokumen	15 Laporan	15 Laporan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Laporan	15 Laporan	
(23)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	
(24)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			90 Pasang	95 Pasang	0	0	95 Pasang	95 Pasang	0	0	
(25)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
(26)	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan			1400 Orang	1500 Orang	100 Orang	100 Orang	1400 Orang	1500 Orang	100 Orang	100 Orang	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	600 Orang	700 Orang	100%	100%	600 Orang	700 Orang	
(27)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor			155 Buah	160 Buah	10 Paket	10 Paket	155 Buah	160 Buah	10 Paket	10 Paket	
(28)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40 Jenis	40 Jenis	10 Paket	10 Paket	40 Jenis	40 Jenis	10 Paket	10 Paket	
(29)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35 Jenis	35 Jenis	20 Paket	20 Paket	35 Jenis	35 Jenis	20 Paket	20 Paket	
(30)	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2000 Orang	2000 Orang	12 Laporan	12 Laporan	2000 Orang	2000 Orang	12 Laporan	12 Laporan	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Kali	100 Kali	12 Laporan	12 Laporan	100 Kali	100 Kali	12 Laporan	12 Laporan	
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%	100%	24 Laporan	24 Laporan	
(31)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			108 Rekening	108 Rekening	12 Laporan	12 Laporan	108 Rekening	108 Rekening	12 Laporan	12 Laporan	
(32)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			46 Orang	46 Orang	12 Laporan	12 Laporan	46 Orang	46 Orang	12 Laporan	12 Laporan	
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	27 Unit	27 Unit	100%	100%	27 Unit	27 Unit	

(33)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	
(34)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5 Jenis	5 Jenis	10 Unit	10 Unit	5 Jenis	5 Jenis	10 Unit	10 Unit	
(35)	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kejadian bencana merupakan kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya. sesuai dengan tupoksinya, BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

Selain itu dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan sebanyak 3 (tiga) tujuan yakni tujuan 1 Tanpa Kemiskinan dengan jumlah indikator sebanyak 5 (lima) indikator, kemudian tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan dengan jumlah indikator sebanyak 6 (enam) indikator, yang terakhir tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Tingginya ancaman bencana di Provinsi Sulawesi Selatan

Lokasi Indonesia berada di 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik di bagian utara Pulau Papua dan Halmahera. Zona ini ditandai dengan keberadaan palung yang cukup dalam. Keberadaan Indonesia di zona ini memberi dampak pada ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, Kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir bandang. Di Provinsi Sulawesi Selatan, ancaman bencana yang sering terjadi adalah banjir, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta gempa bumi.

Isu pemanasan global menjadi salah satu penyebab tingginya ancaman bencana di dunia, termasuk di Sulawesi Selatan. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu bumi akibat dari meningkatnya gas-gas rumah kaca seperti karbon. Meningkatnya kadar gas rumah kaca menyebabkan bumi terkena efek seperti diselimuti kaca, dalam hal ini yang berperan sebagai kaca adalah gas-gas rumah kaca tersebut sehingga mengakibatkan panas dari matahari yang telah masuk ke bumi lalu dipantulkan oleh permukaan bumi yang tidak bisa menembus "lapisan kaca" tersebut sehingga memantul kembali ke bumi dan lebih menghangatkan suhu bumi lagi.

Kondisi ini menyebabkan hujan menjadi jarang dan bila hujan terjadi akan berlebihan. Suhu rata-rata saat musim panas akan jadi sangat panas karena panas menjadi terperangkap, sementara itu saat musim dingin akan menjadi sangat dingin karena pemanasan tidak bisa menjangkau daerah yang jauh dari matahari. Cuaca

menjadi lebih membahayakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya petir, angin puting beliung, angin kencang, banjir, tanah longsor, hujan es, kekeringan, dan bencana lainnya.

2. Tingginya kerentanan Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Ancaman Bencana

Aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunung api (volcanic arc) di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, utara Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Deret gunung api di Indonesia merupakan bagian dari deret gunungapi sepanjang Asia-Pasifik yang sering disebut sebagai *Ring of Fire* atau deret sirkum Pasifik. Zona yang berada diantara pertemuan lempeng dan deret gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah busur depan (*fore arc*) banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sedangkan zona yang berada disisi setelah deret gunung api (*back arc*) cenderung lebih jarang dijumpai patahan aktif dan biasanya banyak dijumpai endapan alluvial dan rawa.

Dampak lain dari aktivitas tektonik adalah terbentuknya patahan atau sesar. Beberapa patahan yang cukup besar antara lain, adalah patahan Semangko di Sumatera, patahan Sorong di Papua dan Maluku, dan patahan Palukoro di Sulawesi. Patahan Palukoro merupakan patahan yang memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bonedengan panjang patahan sekitar 500km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggaral (sebelah selatan Palu). Sebaran patahan sangat berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada disekitar jalur patahan sangat rawan terhadap guncangan gempa bumi yang umumnya relative dangkal. Keberadaan patahan ini memberi dampak pada beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang.

Indonesia juga dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu, Berdasarkan hasil analisis sampai dengan Tahun 2013 (RBI Indonesia, 2016), luas daratan Indonesia adalah 190, 31 Juta Ha, sementara luas tutupan hutannya adalah 82,37 juta Ha atau sekitar 43,28% dari luas daratan Indonesia. Namun tutupan hutan ini tidak tersebar secara proporsional di seluruh pulau di Indonesia.

3. Rendahnya kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Bencana

Tingginya ancaman dan kerentanan wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap bencana seharusnya dibarengi dengan tingginya pemahaman masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana. Sepanjang 5 tahun terakhir, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan pelatihan,

baik melalui APBD Provinsi maupun APBN. Namun, jumlah penduduk yang semakin berkembang setiap tahunnya menjadi pekerjaan rumah bagi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi bencana. Kesadaran masyarakat atas kejadian bencana yang masih rendah serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi 2 hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun formulasi isu-isu berupa rekomendasi dan catatan yang strategis adalah terletak pada proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Sulawesi Selatan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKP

Penyusunan rancangan awal RKPDBPBD Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan setelah adanya usulan dari pemangku kepentingan, termasuk BPBD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Telaahan rancangan awal Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPBD dan tingkat kinerja yang dicapai, serta pagu indikatif yang tersedia.

Hasil rewiu terhadap rancangan awal Renja disesuaikan dengan hasil identifikasi program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja program dan kegiatan (*output* dan *outcome*) serta pagu indikatif yang dialokasikan. Secara umum, usulan program dan kegiatan tidak berbeda dengan rancangan awal Renja yang telah disusun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, usulan program dan kegiatan BPBD dapat dilihat dalam tabel verifikasi rancangan awal Renja 2024.

Review terhadap rancangan awal RKP dapat dilihat pada tabel T-C 31.

Tabel T-C 31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SulSel	Rata – Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata- Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	100 100 100%	9.507.951.717	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SulSel	Rata – Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata- Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	100 100 100%	9.507.951.717	
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SulSel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	2.392.250.924	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SulSel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	2.392.250.924	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SulSel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	342.782.520	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SulSel	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	342.782.520	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SulSel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.049.468.404	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SulSel	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.049.468.404	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Jumlah Tamu Yang difasilitasi	1 Unit 600 Orang	926.710.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum Jumlah Tamu Yang difasilitasi	1 Unit 600 Orang	926.710.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SulSel	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Paket	21.710.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SulSel	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Paket	21.710.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SulSel	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SulSel	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	200.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SulSel	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan	20 Paket	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SulSel	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	120.000.000	
4	Fasilitasi kunjungan tamu	SulSel	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	SulSel	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SulSel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	510.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SulSel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	510.000.000	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SulSel	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	480.060.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SulSel	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	27 Unit	480.060.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SulSel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	321.060.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SulSel	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	321.060.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SulSel	Jenis peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	10 Unit	29.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SulSel	Jenis peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	10 Unit	29.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SulSel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SulSel	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000.000	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	422.870.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	422.870.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	180.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	180.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	62.610.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	62.610.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	64.010.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	64.010.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SulSel	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SulSel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	36.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SulSel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	36.250.000	
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	5.071.326.793	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	5.071.326.793	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SulSel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	4.981.796.793	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SulSel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	4.981.796.793	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SulSel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	64.530.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SulSel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	64.530.000	

3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SulSel	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SulSel	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	214.734.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SulSel	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	214.734.000	
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SulSel	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SulSel	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	-	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SulSel	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	34.734.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SulSel	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	34.734.000	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	SulSel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	180.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	SulSel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	180.000.000	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	SulSel	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100%	7.340.050.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	SulSel	Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia	100%	7.340.050.000	
			Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang	100%				Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang	100%		

			terlatih Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	100%				terlatih Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani	100%		
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	SulSel	Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan bencana	100 Orang	328.491.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	SulSel	Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan bencana	100 Orang	328.491.000	
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	SulSel	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	328.491.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	SulSel	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	328.491.000	
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SulSel	Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2.165.129.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SulSel	Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2.165.129.000	
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	SulSel	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan	100 Orang	250.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	SulSel	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan	100 Orang	250.000.000	

			Mitigasi Bencana					Mitigasi Bencana			
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SulSel	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1 Dokumen	400.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SulSel	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1 Dokumen	400.000.000	
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	SulSel	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	200 orang	509.352.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	SulSel	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	200 orang	509.352.000	
4	Penyusunan Rencana Kontijensi	SulSel	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	1 Dokumen	435.777.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	SulSel	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	1 Dokumen	435.777.000	
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SulSel	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat yang responsif	100%	2.637.672.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SulSel	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat yang responsif	100%	2.637.672.000	
1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SulSel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	12 Laporan	602.107.000	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SulSel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	12 Laporan	602.107.000	

2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SulSel	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.800 Orang	2.035.565.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	SulSel	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.800 Orang	2.035.565.000	
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	SulSel	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5 Laporan/Dokumen	2.208.758.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	SulSel	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5 Laporan/Dokumen	2.208.758.000	
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	SulSel	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	500.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	SulSel	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	500.000.000	
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	SulSel	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	169.500.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	SulSel	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	169.500.000	
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	SulSel	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	1 Laporan	326.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	SulSel	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	1 Laporan	326.000.000	

4	Penanganan Pascabencana Provinsi	SulSel	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	1.213.258.000	Penanganan Pascabencana Provinsi	SulSel	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	1.213.258.000
---	----------------------------------	--------	---	-----------	---------------	----------------------------------	--------	---	-----------	---------------



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan rancangan awal RKPD BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan setelah adanya usulan dari pemangku kepentingan, termasuk BPBD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Telaahan rancangan awal Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPBD.

Eksistensi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan diawali penyusunan RKPD yang dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang melibatkan 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Usulan yang diberikan oleh Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun usulan BPBD Kabupate/Kota se-Sulawesi Selatan tercantum pada tabel T-C 32. sebagai berikut:



Tabel T-C 32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan bencana	100 Orang	SULSEL	APBD	Wajo, Bantaeng, Bulukumba, Barru, Pangkep, Gowa, Tana Toraja, Pare-pare
2			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	SULSEL	APBD	Soppeng, Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, Barru, Pangkep, Gowa, Pare-pare
3		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	SULSEL	APBD	Wajo, Soppeng, Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, Barru, Pangkep, Gowa, Tana Toraja, Pare-pare

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Nasional bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024, penanggulangan bencana yaitu “Peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan” dengan Sasaran Nasional yaitu “Menurunnya kerugian ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana”. Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana yang terdiri dari :

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin professional, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa social yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan darah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Berdasarkan agenda pembangunan RPJMN IV, arah kebijakan umum dan strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 2020 – 2024, maka arah kebijakan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran BNPB dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;

- b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin professional, transparan, dan akuntabel;
- c. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
- d. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
- e. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa social yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
- g. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
- h. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
- i. Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang ingin dicapai setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a) Menurunkan indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
- b) Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut:

- a) Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan
- b) Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan serta Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian Visi, Misi, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebencanaan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Sumber dana program, kegiatan dan sub kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal, termuat dalam 2 program, 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan total pagu indikatif usulan sebesar Rp.16.542.318.911,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Fasilitasi kunjungan tamu
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
 - a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - a) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - b) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

- c) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bersama
- d) Penyusunan Rencana Kontijensi
- e) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- f) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- g) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
 - b) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a) Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
 - b) Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - c) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
 - d) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Tahun 2024 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan di lapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas provinsi. Jumlah program dalam Renja BPBD Tahun 2024 sebanyak 2 program dan 10 kegiatan serta 37 sub kegiatan dengan total pagu indikatif usulan sebesar Rp.16.542.318.911,00. Program prioritas Tahun 2024 sebanyak 1 program, yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan sedangkan program penunjang terdiri atas 1 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan. Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk lokasi kegiatan tersebar pada 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C 33, yaitu sebagai berikut:



Tabel T-C 33.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16,542,318,911.00							18,690,481,717.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			16,542,318,911.00							18,690,481,717.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10,529,958,911.00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			11,508,066,917.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah (Nilai)</i>	100.000									
			<i>Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (Nilai)</i>	100.000									
			<i>Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)</i>	100.000									
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			556.620.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)			01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	16.000									

1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			180.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					196.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2		(BPBD, SULAWESI SELATAN)				2		
		<i>Penyediaan Dokumen Renja Perangkat daerah (Dokumen)</i>	2	180.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			62.610.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	1	
		<i>Penyediaan dokumen RKA OPD (Dokumen)</i>	1	62.610.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			64.010.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	68.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	1	
		<i>Penyediaan dokumen perubahan RKA OPD (Dokumen)</i>	1	64.010.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	1	
		<i>Penyediaan dokumen DPA OPD (Dokumen)</i>	1	25.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			25.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	1		
			Penyediaan dokumen Perubahan DPA OPD (Dokumen)	1	25.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	5		
			Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	100.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.00		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	6.00		
			Penyediaan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	100.000.000,00	(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.215.643.987,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)						5.881.707.993,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	12.000									
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.090.643.987,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)						5.731.707.993,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	40		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)					43		

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	40	5.090.643.987,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur			
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				20.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur	1		
			Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Laporan)	1	20.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	15		
			Penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran OPD (Laporan)	15	100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		(BPBD Sulsel, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	1		
			Penyediaan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	5.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				214.734.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN), (BPBD, SULAWESI SELATAN)						251.108.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan)	3.000									

1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			34.734.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	6		(BPBD Sulsei, SULAWESI SELATAN)				6		
		<i>Penyediaan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	6	34.734.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			180.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	201.108.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	100		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	100	
		<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)</i>	100	180.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.091.710.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN), (BPBD, SULAWESI SELATAN)					1.370.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (Unit)</i>	1.000								
		<i>Jumlah Tamu Yang difasilitasi (Orang)</i>	600.000								
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.710.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	10.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				10.00		
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)</i>	10	21.710.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	10		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	10		
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)</i>	10	200.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	20		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	20		
			<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)</i>	20	120.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	12		
			<i>Fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)</i>	12	100.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat			
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		790.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	12		
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD (Laporan)</i>	12	650.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.792.250.924,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)						2.805.250.924,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)</i>	24.000									

1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			742.782.520,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				12		
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)</i>	12	742.782.520,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.049.468.404,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	2.055.250.924,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	12	
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)</i>	12	2.049.468.404,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			659.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN), (Makassar, SULAWESI SELATAN)					700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)</i>	27.000								
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			400.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)					450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	15		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)					15	
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)</i>	15	400.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	10		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	10	29.000.000,00	(BPBD, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			230.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	2		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	2	230.000.000,00	(Makassar, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur,			
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			6,012,360,000.00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata			7,182,414,800.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia (%)	100.000						Aparatur, Non Aparatur,			
			Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih (%)	100.000						Aparatur, Non Aparatur,			
			Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani (%)	100.000						Aparatur, Non Aparatur,			
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			303.491.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						432.414.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah orang yang terlayani dalam pemberian informasi wilayah rawan bencana (Orang)	100.000									
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			303.491.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						432.414.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota (Orang)	100		(Daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi,					100		

						SULAWESI SELATAN)							
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) (Orang)	100	303.491.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat			
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.611.379.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						1.750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100.000									
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				130.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)					1		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Dokumen)	1	130.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				409.352.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	200		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	200		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana (Orang)	200	409.352.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			

1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	100		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	200		
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	100	250.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat			
1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi			335.777.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas (Dokumen)	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	1		
		Penyusunan Rencana Kontijensi (Dokumen)	1	335.777.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.03.1.02.0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			236.250.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan (Dokumen)	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	0		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (Dokumen)	1	236.250.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	100.00		

			(Orang)										
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)	100	150.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat			
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Unit)	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat	2		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana (Unit)	1	100.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur, Masyarakat			
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.317.672.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						2.740.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik serta Aparat Tanggap Darurat yang responsif (%)	100.000									
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				502.107.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	12		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)					12		
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	12	502.107.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur			
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.815.565.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur		2.190.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)</i>	50000		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur	55000		
			<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)</i>	50.000	1.815.565.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat			
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				1.779.818.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						2.260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana (Laporan / Dokumen)</i>	5.000									
1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi				960.318.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)						1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi (Laporan)</i>	2		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)					2		
			<i>Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Provinsi (Laporan)</i>	2	960.318.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur			
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				169.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			<i>Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Dokumen)</i>	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur	1		
			<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (Dokumen)</i>	1	169.500.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Non Aparatur			

1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Dokumen yang dilegalkan (Dokumen)	1		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur, Non Aparatur	1		
		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	1	350.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur dan Non Aparatur			
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur		380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (kabupaten/kota)	24.00		(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)				Aparatur dan Non Aparatur	24.00		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (kabupaten/kota)	24	300.000.000,00	(Sulawesi Selatan, SULAWESI SELATAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, masyarakat			
J U M L A H				16.542.318.911,00							18.690.481.717,00	



Dokumen perencanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau sering pula disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

No.	Kode Indikator	Target/Indikator
1.	1.5.	Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
2.	11.5	Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
3.	11.b	Pada Tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana

- 11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
- 4. 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara**
- 13.1.1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah
- 13.1.2. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah. Setiap daerah, memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik dan potensi alam maupun buatan yang ada di wilayah tersebut. Penganggulangan bencana menjadi salah satu isu yang diangkat dalam tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDG's). Dengan adanya fokus penanggulangan bencana tersebut, diharapkan resiko bencana yang ada di berbagai daerah dapat ditekan, dan diminimalisir.



BAB V

PENUTUP

Agar pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun Rencana Kerja (Renja). RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang proses penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memperoleh keterpaduan Rancangan Renja antar OPD.

Renja disusun dengan mengacu pada Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-OPD memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, khususnya terkait urusan perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2024.

Makassar, September 2024

KEPALA PELAKSANA,

AMSON PADOLO, S.Sos.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19701113 199203 1 004